

ANALISIS PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI OTORITAS MONETER MELALUI SUKU BUNGA ACUAN (BI7DRR) DALAM PENGENDALIAN INFLASI DI INDONESIA

Fanisatul Izzah^{1*}, Herlina Sekar Ayu², Zahrotun Mufidah³, Rinda Asytuti⁴

¹ UIN K.H. Abdurrahman Wahid,
Pekalongan, Indonesia
fanisatul.izzah24157@mhs.uingusdur.ac.id

² UIN K.H. Abdurrahman Wahid,
Pekalongan, Indonesia
zahrotun.mufidah24131@mhs.uingusdur.ac.id

³ UIN K.H. Abdurrahman Wahid,
Pekalongan, Indonesia
herlina.sekar.ayu24133@mhs.uingusdur.ac.id

⁴ UIN K.H. Abdurrahman Wahid,
Pekalongan, Indonesia
rinda.asytuti@uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam pengendalian inflasi di Indonesia melalui kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) selama periode 2016–2026. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan berbagai literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas harga melalui penetapan BI7DRR sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Kebijakan tersebut memengaruhi inflasi melalui mekanisme transmisi suku bunga, kredit, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi. Selama periode penelitian, inflasi mengalami fluktuasi akibat perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, termasuk pada tahun 2026 ketika inflasi mencapai 3,34% (year-on-year Juni 2026) dan BI7DRR dipertahankan pada level 5,75%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh penyesuaian BI7DRR, tetapi juga oleh efektivitas peran Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter yang kredibel dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.

Kata kunci : Bank Indonesia; otoritas moneter; BI 7-Day Reverse Repo Rate; inflasi; kebijakan moneter.

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam era globalisasi dan keterbukaan ekonomi saat ini, stabilitas tersebut menjadi semakin rentan terhadap berbagai guncangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari faktor eksternal seperti gejolak pasar keuangan global dan perubahan harga komoditas dunia. Salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas tersebut adalah tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan lemahnya aktivitas ekonomi. Selain itu, stabilitas inflasi juga berkaitan erat dengan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi perekonomian suatu negara, sehingga pengendalian inflasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi makro, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi fokus utama kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral (Ningsih & Kristiyanti, 2016).

Kebijakan moneter bekerja melalui mekanisme transmisi yang salah satunya menggunakan instrumen suku bunga acuan. Suku bunga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi inflasi dalam perekonomian, karena perubahan suku bunga akan berdampak pada keputusan konsumsi dan investasi masyarakat. Dalam literatur keuangan, suku bunga bahkan dianggap sebagai salah satu faktor utama yang dapat mendorong terjadinya inflasi, baik melalui jalur permintaan agregat maupun ekspektasi ekonomi (Beureukat, 2022). Hubungan antara suku bunga dan inflasi dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan yang berbeda. Dalam Teori Fisher, dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara suku bunga dan inflasi, di mana kenaikan inflasi cenderung diikuti oleh peningkatan suku bunga. Sebaliknya, dalam Teori Wicksell, hubungan yang terjadi justru bersifat negatif, dengan suku bunga berperan sebagai faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hubungan antara suku bunga dan inflasi tidaklah sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan dinamika dalam perekonomian (Anari & Kolari, 2016). Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan antara suku bunga dan inflasi menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan moneter yang efektif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi (output riil), serta menciptakan kesempatan kerja yang luas. Namun demikian, dalam praktiknya, fokus utama kebijakan moneter di berbagai negara, termasuk Indonesia, saat ini lebih diarahkan pada pengendalian inflasi sebagai prioritas utama. Dalam implementasinya, Bank Indonesia menggunakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) (Bank Indonesia, 2023). Penggunaan BI7DRR sebagai suku bunga acuan juga mencerminkan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, khususnya dalam memengaruhi suku bunga pasar uang dan sektor perbankan.

Perkembangan inflasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor domestik maupun global (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik, inflasi Indonesia mengalami fluktuasi dalam

periode 2016–2026, mulai dari inflasi rendah saat pandemi hingga lonjakan inflasi pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dan pangan global (Badan Pusat Statistik, 2024). Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia secara aktif menyesuaikan BI7DRR sebagai instrumen stabilisasi (Bank Indonesia, 2023).

Berikut merupakan gambaran perkembangan BI7DRR dan inflasi di Indonesia:

Perkembangan Inflasi dan BI7DRR di Indonesia (2016–2026)		
Tahun	Inflasi (%)	BI7DRR (%)
2016	3,02	4,75
2017	3,61	4,25
2018	3,13	6,00
2019	2,72	5,00
2020	1,68	3,75
2021	1,87	3,50
2022	5,51	5,50
2023	2,61	6,00
2024	1,57	6,00
2025	2,92	5,75
2026 (hingga juni)	3,34	5,75

Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data perkembangan inflasi dan BI7DRR periode 2016–2026, terlihat bahwa kedua variabel mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika perekonomian nasional maupun global. Pada periode 2016–2019, tingkat inflasi relatif terkendali pada kisaran target Bank Indonesia, yaitu sekitar 3%, sehingga BI7DRR juga berada pada level yang relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga dapat dipertahankan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

Memasuki periode 2020–2021, inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19. Sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi tersebut, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR untuk mendorong konsumsi, investasi, dan pemulihan sektor riil. Kebijakan ini menunjukkan bahwa BI7DRR tidak hanya digunakan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi pada saat terjadi tekanan ekonomi. Pada tahun 2022, inflasi meningkat hingga mencapai 5,51% yang dipicu oleh kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok global, serta meningkatnya tekanan inflasi dunia. Untuk meredam tekanan tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR secara bertahap. Selanjutnya pada periode 2023–2025, inflasi kembali bergerak menuju kisaran target yang diikuti oleh kebijakan suku bunga yang lebih stabil. Pola ini menunjukkan bahwa BI7DRR digunakan secara aktif sebagai instrumen kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga sekaligus merespons perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.

Memasuki tahun 2026, dinamika perekonomian Indonesia kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 mencapai **3,34%**, meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar **2,5±1%**. Peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan

harga transportasi, pangan, serta tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor. Sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar, Bank Indonesia secara bertahap menaikkan BI7DRR hingga **5,75%** pada Juni 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, serta memastikan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kondisi tahun 2026 kembali menunjukkan bahwa BI7DRR berfungsi sebagai instrumen utama Bank Indonesia dalam merespons perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global (Bank Indonesia, 2026).

Penelitian Suseno dan Agusalam menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM) untuk menganalisis hubungan suku bunga dan inflasi di Indonesia periode 2011–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga Bank Indonesia memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jalur suku bunga masih menjadi instrumen penting dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia (Suseno & Agusalam, 2024). Sementara itu, Sari, Herlin, dan Havilla (2024) menggunakan metode Vector Autoregression (VAR) untuk menguji pengaruh BI Rate dan BI7DRR terhadap inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh signifikan terhadap inflasi, sedangkan BI7DRR menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas instrumen suku bunga dapat berbeda bergantung pada periode dan kondisi ekonomi yang dianalisis (Sari et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hubungan antara suku bunga dan inflasi di Indonesia. Suseno & Agusalam (2024), menganalisis efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga menggunakan metode Error Correction Model (ECM), sedangkan Sari et al. (2024), mengkaji pengaruh BI Rate dan BI7DRR terhadap inflasi menggunakan metode Vector Autoregression (VAR). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada hubungan empiris dan pengaruh statistik antarvariabel. Kajian yang menjelaskan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menggunakan BI7DRR untuk merespons dinamika inflasi, termasuk melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter dan adanya time lag kebijakan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran BI7DRR dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya melihat hubungan antara BI7DRR dan inflasi, tetapi juga mengkaji peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menjaga stabilitas harga. Penelitian ini menempatkan BI7DRR sebagai instrumen kebijakan moneter yang dianalisis dari aspek mekanisme transmisi, time lag kebijakan, serta respons kebijakan terhadap dinamika ekonomi domestik dan global. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan BI7DRR dengan inflasi di Indonesia, mengkaji efektivitas BI7DRR sebagai instrumen kebijakan moneter, serta menganalisis peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoretis Hubungan Suku Bunga dan Inflasi

Hubungan antara suku bunga dan inflasi dalam literatur ekonomi makro sering kali dijelaskan melalui dua pendekatan utama yang memiliki sudut pandang berbeda, yaitu Teori Fisher dan Teori Wicksell. Teori Fisher mengemukakan adanya hubungan positif antara suku bunga dan inflasi, di mana ekspektasi inflasi yang meningkat akan mendorong kenaikan suku bunga nominal agar suku bunga riil tetap stabil. Di sisi lain, Teori Wicksell melihat suku bunga sebagai instrumen aktif yang memengaruhi tingkat harga; jika suku bunga bank berada di bawah suku bunga alami, maka investasi akan meningkat dan memicu inflasi, sehingga hubungan ini bersifat lebih dinamis dan fungsional sebagai alat pengendali. Pemahaman teoretis ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa perubahan suku bunga acuan oleh bank sentral bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan sebuah sinyal kebijakan yang merespons ekspektasi ekonomi dan permintaan agregat. Dalam konteks penelitian ini, suku bunga dipandang sebagai faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara pada stabilisasi tingkat harga di pasar.

Evolusi Instrumen Moneter dan Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tunggal di Indonesia memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas harga (inflasi), mendorong pertumbuhan output riil, serta menciptakan lapangan kerja. Salah satu tonggak penting dalam kebijakan moneter Indonesia adalah penggunaan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sejak tahun 2016 sebagai suku bunga acuan utama. Instrumen ini dipilih untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, terutama dalam memengaruhi suku bunga di pasar uang dan sektor perbankan secara lebih cepat dan efisien. Penggunaan BI7DRR mencerminkan penerapan kerangka kerja Inflation Targeting Framework (ITF), di mana bank sentral secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik. Penelitian ini menyoroti bahwa peran Bank Indonesia dalam periode 2016–2026 tidak hanya terbatas pada penetapan angka suku bunga, tetapi juga melibatkan kemampuan adaptasi terhadap guncangan ekonomi, seperti pandemi COVID-19 pada 2020–2021 yang memaksa BI menurunkan suku bunga untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (MTKM)

Literatur mengenai kebijakan moneter menekankan bahwa pengaruh suku bunga terhadap inflasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai jalur yang kompleks dalam mekanisme transmisi. Jalur pertama adalah jalur suku bunga, di mana kenaikan BI7DRR akan mendorong kenaikan suku bunga kredit perbankan, sehingga menurunkan permintaan agregat dan meredam tekanan inflasi. Jalur kedua adalah jalur kredit, yang sangat vital di Indonesia mengingat dominasi sektor perbankan; kenaikan suku bunga akan memperketat penyaluran kredit kepada dunia usaha. Selain itu, terdapat jalur nilai tukar dan jalur ekspektasi yang semakin signifikan di era ekonomi terbuka. Kenaikan suku bunga domestik cenderung menarik aliran modal asing, memperkuat nilai tukar rupiah, dan menurunkan harga barang impor

(imported inflation). Sementara itu, melalui jalur ekspektasi, kredibilitas Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan akan membentuk persepsi masyarakat terhadap inflasi masa depan; jika masyarakat percaya bank sentral mampu menjaga stabilitas, mereka tidak akan menaikkan harga secara berlebihan, sehingga inflasi tetap terkendali.

Fenomena Jeda Waktu (Time Lag) dan Dinamika Empiris

Salah satu aspek penting yang sering dibahas dalam literatur moneter dan ditemukan kembali dalam penelitian ini adalah adanya jeda waktu (time lag) kebijakan. Dampak dari perubahan BI7DRR tidak langsung tercermin pada angka inflasi di bulan yang sama karena kebijakan tersebut harus melalui tahapan di sektor keuangan dan sektor riil sebelum memengaruhi harga-harga di tingkat konsumen. Studi terdahulu menyebutkan bahwa jeda waktu ini bisa bervariasi antara beberapa bulan hingga hitungan tahun, tergantung pada struktur pasar keuangan dan kondisi ekonomi saat itu. Secara empiris, penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam mengenai efektivitas instrumen ini. Sebagai contoh, Suseno & Agusalm (2024) menemukan hubungan positif signifikan antara suku bunga BI dan inflasi dalam jangka panjang menggunakan metode ECM. Namun, Sari et al. (2024) menemukan bahwa BI7DRR terkadang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan secara statistik pada periode tertentu dibandingkan instrumen BI Rate lama. Perbedaan hasil ini mempertegas bahwa efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada konteks ekonomi global, seperti lonjakan harga energi pada tahun 2022 yang menyebabkan inflasi Indonesia melonjak hingga 5,51% meskipun suku bunga telah disesuaikan.

Kebaruan dan Fokus Analisis Kontekstual

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan tidak hanya berfokus pada hubungan statistik antar variabel, tetapi juga menganalisis peran kualitatif Bank Indonesia sebagai otoritas yang adaptif dan kredibel. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis mekanisme transmisi, dampak time lag, serta respons kebijakan terhadap dinamika ekonomi terkini hingga tahun 2026. Fokus pada tahun 2026 memberikan gambaran bagaimana Bank Indonesia merespons inflasi yang mencapai 3,34% (Juni 2026) dengan mempertahankan BI7DRR pada level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi publik di tengah ketidakpastian global. Secara keseluruhan, literatur review ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia adalah hasil dari kombinasi kebijakan suku bunga yang tepat, manajemen ekspektasi publik yang kuat, serta koordinasi yang efektif antara kebijakan moneter dan kondisi pasar riil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif sebagai fondasi metodologis utamanya. Pemilihan desain ini sangat relevan mengingat fokus penelitian bukan sekadar mencari korelasi statistik yang kaku, melainkan bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis mengenai fenomena peran Bank Indonesia dalam mengelola instrumen moneter. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis kontekstual terhadap berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi sepanjang periode 2016 hingga 2026, seperti dampak pandemi COVID-19 dan

guncangan harga energi global, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka semata. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan bagaimana BI7DRR berfungsi sebagai sinyal kebijakan yang merespons dinamika pasar secara adaptif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat data sekunder, yang berarti data telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan resmi dan publikasi. Peneliti bersandar pada kredibilitas institusi otoritas seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data makroekonomi yang akurat, khususnya terkait angka inflasi tahunan dan tingkat suku bunga acuan BI7DRR. Rentang waktu penelitian yang cukup panjang, yakni 2016 hingga 2026, dipilih untuk memberikan perspektif longitudinal yang memadai agar peneliti dapat menangkap siklus kebijakan moneter dalam berbagai kondisi ekonomi yang berbeda, mulai dari masa stabil, masa krisis, hingga masa pemulihan dan penyesuaian terbaru di pertengahan tahun 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pilar utama, yaitu studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi difokuskan pada penelusuran laporan resmi, tabel statistik, dan siaran pers dari BI dan BPS untuk memetakan fluktuasi riil BI7DRR dan inflasi dari tahun ke tahun. Di sisi lain, studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah, buku teks ekonomi moneter, dan hasil penelitian terdahulu (seperti karya Suseno & Agusalm serta Sari et al.) untuk memperkuat landasan teoretis mengenai mekanisme transmisi dan teori suku bunga. Kombinasi kedua teknik ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya berbasis pada fakta lapangan, tetapi juga didukung oleh kerangka akademik yang kuat.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, peneliti melakukan identifikasi tren dengan melihat pola pergerakan inflasi dan respons suku bunga acuan sepanjang periode penelitian. Kedua, peneliti melakukan pengkajian mendalam terhadap mekanisme transmisi kebijakan moneter, yang mencakup jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, hingga jalur ekspektasi publik. Terakhir, peneliti melakukan sintesis untuk menganalisis efektivitas peran Bank Indonesia dengan mempertimbangkan fenomena jeda waktu (*time lag*), di mana dampak kebijakan moneter tidak terjadi secara instan. Analisis ini bertujuan untuk menyimpulkan bagaimana kredibilitas dan transparansi otoritas moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Inflasi di Indonesia

Tahun	Inflasi (%)	BI7DRR (%)
2016	3,02	4,75
2017	3,61	4,25
2018	3,13	6,00
2019	2,72	5,00
2020	1,68	3,75
2021	1,87	3,50
2022	5,51	5,50

2023	2,61	6,00
2024	1,57	6,00
2025	2,92	5,75
2026 (hingga juni)	3,34	5,75

Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Perkembangan inflasi di Indonesia selama periode 2016–2026 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global. Pada periode 2016–2019, inflasi relatif terkendali pada kisaran 2,72%–3,61%, yang menunjukkan stabilitas harga dan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Kondisi tersebut juga didukung oleh terjaganya pasokan barang serta stabilitas nilai tukar (Bank Indonesia, 2023).

Memasuki periode 2020–2021, inflasi mengalami penurunan hingga berada di bawah 2%. Kondisi ini dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi. Rendahnya permintaan masyarakat pada periode tersebut berkontribusi terhadap menurunnya tekanan inflasi (Aini, Z. N., Habiba, M. P., Rizki, M. F., & Sujianto, 2026).

Pada tahun 2022, inflasi meningkat menjadi 5,51%, yang merupakan tingkat tertinggi selama periode penelitian. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya harga energi dan pangan global serta gangguan rantai pasok pascapandemi yang turut memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh perkembangan ekonomi global (World Bank, 2022).

Selanjutnya, pada periode 2023–2025, inflasi kembali bergerak menuju kisaran target Bank Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi mulai mereda seiring membaiknya kondisi perekonomian dan berbagai kebijakan stabilisasi yang diterapkan. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi selama periode penelitian menunjukkan bahwa dinamika inflasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor permintaan, penawaran, serta berbagai guncangan eksternal yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif.

Pada tahun **2026**, inflasi kembali meningkat menjadi **3,34%** (year-on-year Juni 2026), meskipun masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga transportasi, pangan, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya impor menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, Bank Indonesia merespons kondisi tersebut dengan menaikkan BI7DRR secara bertahap hingga mencapai **5,75%** pada Juni 2026. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan ekspektasi inflasi, serta memastikan tekanan inflasi tidak berkembang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2026 kebijakan moneter kembali diarahkan pada penguatan stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya tekanan eksternal dan domestik (Badan Pusat Statistik, 2026).

Keterkaitan BI7DRR dengan Pengendalian Inflasi

BI7DRR merupakan instrumen kebijakan moneter utama yang digunakan Bank Indonesia dalam kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) untuk menjaga stabilitas harga. Sebagai suku bunga acuan, BI7DRR berfungsi sebagai sinyal kebijakan yang mencerminkan arah kebijakan moneter Bank Indonesia dalam merespons berbagai dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi inflasi. Oleh karena itu, keterkaitan BI7DRR dengan inflasi tidak hanya dapat dilihat sebagai hubungan antara suku bunga dan tingkat harga, tetapi juga sebagai bentuk respons kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian (Liu et al., 2026).

Dalam teori kebijakan moneter, perubahan suku bunga digunakan untuk memengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Ketika tekanan inflasi meningkat, bank sentral cenderung menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat melalui kenaikan suku bunga guna menjaga stabilitas harga. Sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi melemah dan tekanan inflasi relatif rendah, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Dengan demikian, BI7DRR memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi (Suseno & Agusalm, 2024). Namun demikian, keterkaitan antara BI7DRR dan inflasi tidak selalu menunjukkan pola yang sederhana. Dalam praktiknya, perubahan inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi permintaan dan penawaran, nilai tukar, harga energi, harga komoditas global, serta ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan ekonomi di masa mendatang. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan inflasi sering kali tidak dapat dijelaskan hanya melalui perubahan suku bunga acuan semata (Ningsih & Kristiyanti, 2016).

Selain itu, hubungan yang terlihat antara BI7DRR dan inflasi sering kali mencerminkan karakter kebijakan moneter yang bersifat responsif. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia cenderung menyesuaikan BI7DRR sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Sebaliknya, ketika inflasi menurun dan aktivitas ekonomi melemah, kebijakan suku bunga dapat diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dengan kata lain, perubahan BI7DRR tidak selalu menjadi penyebab awal perubahan inflasi, tetapi juga merupakan respons terhadap perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung (Suseno & Agusalm, 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan BI7DRR dengan inflasi perlu dipahami dalam perspektif kebijakan moneter yang lebih luas. BI7DRR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi, tetapi juga sebagai alat yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas BI7DRR dalam mengendalikan inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global yang berkembang pada setiap periode. Pemahaman terhadap keterkaitan ini menjadi penting karena menjadi dasar bagi Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi perekonomian yang dihadapi.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui BI7DRR

Meskipun BI7DRR merupakan instrumen utama kebijakan moneter Bank Indonesia, pengaruhnya terhadap inflasi tidak terjadi secara langsung. Perubahan BI7DRR terlebih dahulu ditransmisikan melalui berbagai sektor dalam perekonomian sebelum akhirnya memengaruhi tingkat harga. Proses penyaluran kebijakan tersebut

dikenal sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi merupakan jalur yang menghubungkan kebijakan moneter dengan sektor riil melalui perubahan perilaku pelaku ekonomi, sektor keuangan, dan pasar keuangan (Bank Indonesia, 2023).

Salah satu jalur yang paling utama adalah jalur suku bunga (interest rate channel). Ketika Bank Indonesia menaikkan BI7DRR, perbankan umumnya akan menyesuaikan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit. Kenaikan suku bunga kredit menyebabkan biaya pembiayaan menjadi lebih tinggi sehingga rumah tangga maupun dunia usaha cenderung menunda konsumsi dan investasi yang menggunakan fasilitas kredit. Sebaliknya, ketika BI7DRR diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih rendah sehingga aktivitas konsumsi dan investasi berpotensi meningkat. Perubahan perilaku ekonomi tersebut kemudian memengaruhi tingkat permintaan agregat yang pada akhirnya berdampak terhadap inflasi (Janah & Pujiati, 2018).

Selain melalui jalur suku bunga, kebijakan moneter juga ditransmisikan melalui jalur kredit (credit channel). Dalam sistem keuangan Indonesia yang masih didominasi oleh sektor perbankan, penyaluran kredit memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Ketika suku bunga meningkat, permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha cenderung menurun karena biaya pembiayaan menjadi lebih mahal. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan kredit sehingga mendorong aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan BI7DRR sangat dipengaruhi oleh kemampuan perbankan dalam meneruskan perubahan suku bunga acuan ke masyarakat melalui mekanisme kredit (Janah & Pujiati, 2018).

Mekanisme transmisi juga berlangsung melalui jalur nilai tukar (exchange rate channel). Perubahan BI7DRR dapat memengaruhi arus modal internasional yang pada akhirnya berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Kenaikan suku bunga domestik umumnya meningkatkan daya tarik aset keuangan dalam negeri sehingga dapat mendorong masuknya aliran modal dan memperkuat nilai tukar rupiah. Penguatan nilai tukar akan membantu menekan harga barang impor dan mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebaliknya, pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri (Bank Indonesia, 2023).

Selain ketiga jalur tersebut, terdapat jalur ekspektasi inflasi (expectation channel) yang semakin penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter modern. Jalur ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat dan pelaku usaha membentuk persepsi terhadap kondisi ekonomi dan inflasi di masa mendatang. Ketika Bank Indonesia dinilai kredibel dalam menjaga stabilitas harga, masyarakat cenderung memiliki ekspektasi inflasi yang lebih terkendali. Sebaliknya, apabila ekspektasi inflasi meningkat, pelaku usaha dapat menaikkan harga lebih awal sebagai antisipasi terhadap kenaikan biaya di masa depan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan moneter tidak hanya ditentukan oleh perubahan instrumen suku bunga, tetapi juga oleh kemampuan Bank Indonesia dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan (Janah & Pujiati, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme transmisi kebijakan moneter menunjukkan bahwa pengaruh BI7DRR terhadap inflasi berlangsung melalui berbagai

jalur yang saling berkaitan. Efektivitas kebijakan moneter tidak hanya ditentukan oleh perubahan suku bunga acuan, tetapi juga dipengaruhi oleh respons sektor perbankan, kondisi pasar keuangan, pergerakan nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian inflasi memerlukan mekanisme transmisi yang berjalan secara efektif agar kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia dapat diteruskan secara optimal ke seluruh sektor perekonomian.

Time Lag Kebijakan Moneter dalam Pengendalian Inflasi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya time lag atau jeda waktu dalam hubungan antara BI7DRR dan inflasi. Time lag menunjukkan bahwa perubahan suku bunga acuan tidak langsung berdampak pada perubahan tingkat inflasi dalam periode yang sama, melainkan membutuhkan waktu tertentu hingga pengaruh tersebut benar-benar terlihat dalam perekonomian. Dalam praktiknya, ketika Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan BI7DRR, dampaknya tidak serta-merta dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena kebijakan suku bunga harus melalui beberapa tahapan sebelum memengaruhi inflasi. Perubahan BI7DRR terlebih dahulu akan memengaruhi suku bunga di sektor perbankan, seperti bunga kredit dan simpanan. Selanjutnya, perubahan tersebut akan memengaruhi keputusan masyarakat dan pelaku usaha, terutama dalam hal konsumsi dan investasi. Setelah itu, barulah terjadi perubahan pada tingkat permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi.

Proses yang bertahap ini menyebabkan adanya jeda waktu antara kebijakan yang diambil dan hasil yang diharapkan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa jeda waktu kebijakan moneter dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada situasi ekonomi dan struktur pasar keuangan (Aini, Z. N., Habiba, M. P., Rizki, M. F., & Sujianto, 2026). Hal ini menjelaskan mengapa hubungan antara tingkat suku bunga dan inflasi tidak selalu tampak secara langsung dalam data. Keberadaan time lag ini memiliki implikasi penting dalam perumusan kebijakan moneter. Otoritas moneter perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi ke depan dalam menetapkan kebijakan, karena dampak dari keputusan yang diambil saat ini baru akan dirasakan pada periode berikutnya. Dengan demikian, ketepatan dalam memperkirakan jeda waktu menjadi hal yang krusial agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak yang kurang optimal bagi perekonomian.

Peran Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga kestabilan harga di Indonesia, terutama dengan mengendalikan inflasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bank Indonesia menggunakan BI7DRR sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Melalui perubahan suku bunga acuan ini, Bank Indonesia berupaya memengaruhi aktivitas ekonomi agar inflasi tetap berada dalam kisaran yang stabil.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia cenderung bersifat responsif terhadap kondisi inflasi. Artinya, ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi.

Sebaliknya, ketika inflasi rendah atau ekonomi melemah, suku bunga akan diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Pola ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak hanya menetapkan kebijakan secara tetap, tetapi menyesuaikannya dengan dinamika ekonomi yang terjadi (Jumaedi, M., Ferdaus, N. N., & Aptasari, 2025). Selain itu, keberhasilan kebijakan moneter tidak hanya ditentukan oleh instrumen yang digunakan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia. Ketika masyarakat percaya bahwa Bank Indonesia mampu mengendalikan inflasi, maka mereka akan membentuk ekspektasi inflasi yang lebih stabil. Misalnya, pelaku usaha tidak akan menaikkan harga secara berlebihan karena yakin inflasi akan tetap terkendali. Hal ini membuat kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif.

Transparansi dan komunikasi kebijakan juga menjadi faktor penting. Bank Indonesia secara rutin menyampaikan arah kebijakan dan kondisi ekonomi kepada publik. Dengan komunikasi yang jelas, masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan yang diambil, sehingga reaksi yang muncul menjadi lebih terkendali. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat efektivitas kebijakan suku bunga dalam menjaga stabilitas harga. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak hanya terletak pada penggunaan BI7DRR sebagai alat kebijakan, tetapi juga pada kemampuannya dalam merespons kondisi ekonomi, menjaga kredibilitas, serta mengelola ekspektasi masyarakat. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai otoritas moneter dalam menjaga stabilitas harga melalui penggunaan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Penyesuaian BI7DRR terbukti menjadi respons Bank Indonesia terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik yang dipengaruhi oleh faktor domestik maupun global, sehingga mampu mendukung terciptanya stabilitas inflasi di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas BI7DRR dalam mengendalikan inflasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan suku bunga acuan, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme transmisi kebijakan moneter, kondisi perekonomian, nilai tukar, harga komoditas, serta ekspektasi masyarakat. Selain itu, adanya *time lag* menyebabkan dampak kebijakan moneter tidak langsung tercermin pada tingkat inflasi, sehingga kebijakan yang ditetapkan memerlukan waktu sebelum memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, tujuan penelitian ini telah menunjukkan bahwa BI7DRR merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung pengendalian inflasi apabila didukung oleh mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berjalan dengan baik serta respons kebijakan yang adaptif terhadap dinamika perekonomian. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar stabilitas inflasi dan perekonomian nasional dapat terpelihara secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Aini, Z. N., Habiba, M. P., Rizki, M. F., & Sujianto, A. E. (2026). Pengaruh bi-rate dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 28(1). <https://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/download/8997/5879>
- Anari, A., & Kolari, J. (2016). Dynamics of Interest and Inflation Rates. *Journal of Empirical Finance*, 39.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. *Jakarta: Badan Pusat Statistik*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia. *Jakarta: Badan Pusat Statistik*.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/07/01/2590/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-juni-2026-sebesar-3-34-persen-.html>
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia. *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2026). *IHK Juni 2026 Tetap Terjaga*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2812926.aspx
- Beureukat. (2022). Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia. *Oikonomika Jurnal Manajemen*, 18(1), 39–46. <http://journal.unas.ac.id/oikonamia/index>
- Janah, I. U., & Pujiati, A. (2018). Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Ekspektasi dalam Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 7(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v7i4.27719>
- Jumaedi, M., Ferdaus, N. N., & Aptasari, F. W. (2025). KEBIJAKAN MONETER DALAM MENJAGA INFLASI DAN STABILITAS EKONOMI DI INDONESIA. *Jie (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, 4(2), 76–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.59827/jie.v4i2.311>
- Liu, S. Y., Ballo, F. W., Mushlih, M. A. H., & Tiwu, M. I. H. (2026). Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter pada Perbankan Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia. *ARMADA :Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 04(05), 820–831. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2202>
- Ningsih, S., & Kristiyanti, L. (2016). ANALISIS PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA PERIODE 2014-2016. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 20(2). <https://journals.ums.ac.id/dayasaing/article/view/7258>
- Sari, Y., Herlin, F., & Havilla, S. (2024). *Ekonomis : Journal of Economics and Business Pengaruh Suku Bunga BI Rate dan BI 7 Day Reverse Repo Rate terhadap Inflasi di Indonesia dengan Metode Vector Autoregression (VAR)*.

8(1), 754–762. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1711>

Suseno, A. M., & Agusalim, L. (2024). *Hubungan Suku Bunga dan Inflasi : Studi Empiris di Indonesia*. 2(3), 122–131.
<https://journal.satriaajaya.com/index.php/jemes>

World Bank. (2022). *Global Economic Prospects. Washington,DC: World Bank.*